

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya

Mahasiswa Peneliti (MP) : Muhammad Bramantyo

Narasumber (NS) : Bapak Supriaji Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya

Tanggal : 16 Januari 2018

MP : Bagaimana awal proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya saat mulai berlakunya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah?

NS : Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mau tidak mau Pemerintah Kabupaten/kota melaksanakan pemungutan PBB-P2 tersebut. Dan dalam UU nomor 28 itu menyebutkan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah atau kota adalah pbb sektor P2. Sejalan dengan adanya aturan itu maka mulai dilakukan masa persiapan2 untuk penyerahan kewenangan PBB dari pemerintah pusat kepada pemda kabupaten/kota. Nah, itu persiapannya sampai 3 tahun. Mulai persiapannya sejak diterbitkan UU Nomor 28 tahun 2009. Dan ketika

masuk tahun 2013 pemerintah kabupaten/kota sudah mulai melaksanakan pemungutan PBB-P2 ini. Namun terdapat kendala mengenai transfer data maka pemerintah pusat melakukan pemanjangan waktu persiapan yaitu paling lambat 1 tahun, dan pemerintah pusat menargetkan 1 Januari 2014 sudah harus sudah dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi atau sanksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

MP : Bagaimana persiapan dari segi sdm, sarana dan prasarana demi terlaksananya pengalihan PBB-P2 ini pak?

NS : Secara umum sudah baik ya. Cukup lah ya. Hanya saja kekurangan kita ini yaitu fasilitas layanan dan ruang publik. Ruang konsultasi, ruang tunggu juga terbatas. Ruang arsip khusus juga masih gabung dengan ruangan yang lain. Kalo untuk SDM dari segi kualitas sudah cukup, hanya saja dari segi kuantitas masih kurang khususnya untuk SDM yang langsung turun di lapangan.

MP : Bagaimana tanggapan masyarakat terkait perda ini?

NS : Tanggapan masyarakat sangat bagus, karena dari tempat pembayaran PBB-P2 menjadi lebih dekat dan tidak harus di kota lagi.

MP : Untuk tahun 2013 faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya?

NS : Tentulah namanya datanya baru diserahkan masih banyak kendala, banyak ketidaksesuaian data. Antara data yang diatas kertas yang kita

terima dengan data di lapangan. Nah ini perlu rekonsiliasi perlu kerja keras dengan melibatkan 2 tim, tim dari pemda dan tim dari kpp. Bahkan adanya pemda mengirimkan pegawainya untuk mendapatkan pelatihan disana selama 2 sampai 3 bulan. Kita kirim 2 orang disini untuk mendapatkan pelatihan disana. Itulah salah satu dari tahapan tahapan awal kita untuk melakukan pengolahan pbb ini. Pemungutannya sih sebenarnya sudah siap, hanya saja kan pirantinya masih harus kita sempurnakan.

MP : Berarti upaya dari pemerintah Kabupaten kubu raya pada tahun 2013 dalam rangka menghadapi kendala ini selain dari memaksimalkan sdm yang ada dengan memagangkan mereka di KPP Pratama setempat mungkin ada yang lain lagi?

NS : Iya kebetulan secara bertahap kami menjalankan pembelajaran namanya kaji terap ke kabupaten kota yang lebih maju pengolahan pajaknya. Hasilnya adalah kite mengimplementasikan pembelajaran tadi ke dalam membangun sistem untuk peningkatan pelayanan PBB-P2 kepada masyarakat. Sistem sudah kita bangun dan sudah di launching oleh pak Bupati.

MP : faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 itu apa ya pak?

NS : dilihat dari kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dari sanksi yang kita berikan jika mereka tidak melakukan pembayaran PBB-P2. Hal itu mungkin

dapat memberikan efek jera kepada wp dan dapat meningkatkan hasil pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya ini.

MP : pada tahun 2014, apa yang menjadi kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini pak?

NS : Kesuksesan PBB dan BPHTB adalah ditentukan kepada pengelolaan basis data. Data ini sifatnya dinamis. Sepanjang masyarakat melaporkan adanya mutasi pada propertinya tersebut maka akan cepat terjadi penyesuaian pada datanya. Namun ketika mutasi tersebut tidak dilaporkan maka selama itulah transformasi data tersebut tidak berubah. Sedangkan penagihan piutang pajaknya berlangsung terus. Maka itulah menjadi salah satu faktor yang membuat ketidaksesuaian antara SPPT yang dicetak dengan tagihan yang sebenarnya.

MP : upaya yang dilakukan BPPRD dalam menghadapi hambatan proses pemungutan PBB-P2 pada tahun 2014 kemarin pak?

NS : Sosialisasi ke masyarakat sangat diperlukan kita bahkan kerja sama dengan media cetak maupun media elektronik setempat. Kita biasanya kalau sosialisasi langsung ke masyarakat melakukan seperti talk show atau penyuluhan di kantor desa setempat.

MP : faktor pendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 kemarin pak?

NS : dari pihak pegawai BPPRD yang mungkin sudah mulai mengerti bagaimana melakukan tata cara pemungutan PBB-P2 dikarenakan sudah pernah melakukannya pada tahun 2013 lalu

MP : pada tahun 2015 apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya ini pak?

NS : kebanyakan hambatan yang terjadi pada tahun 2015 adalah banyaknya SPPT yang tidak sampai kepada wajib pajak yang ada di Kabupaten Kubu Raya

MP : upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut pak?

NS : kita melakukan pemutakhiran data PBB-P2 dengan validasi piutang PBB-P2 yang valid. Sehingga dapat memperkecil kesalahan kesalahan yang ada

MP : faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 kemarin pak?

NS : sdm dari pihak BPPRD yang sudah semakin paham akan bagaimana melakukan pemungutan dengan baik dan benar

MP : kalau di tahun 2016 pak, apa yang menjadi kendala pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya?

NS : kendalanya kurang lebih sama ya mas dengan tahun – tahun sebelumnya. Cuma tidak separah dulu dikarenakan evaluasi sudah

dilaksanakan. Untuk tahun 2016 mungkin kendalanya adalah ada beberapa masyarakat di Kabupaten Kubu Raya yang tidak dapat membayar PBB-P2 dikarenakan faktor geografis, terutama masyarakat yang di daerah pesisir.

MP : apa upaya yang dilakukan oleh BPPRD dalam menanggulangi hal tersebut pak?

NS : memperbanyak fasilitas tempat pembayaran PBB secara online dengan Bank Kalbar, PT. Pos Indonesia, dan juga Indomaret

MP : Faktor pendukung dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 pak?

NS : mungkin kepercayaan masyarakat kepada kita sudah semakin meningkat. Karena masyarakat semakin sadar kalau uang pajak yang mereka bayarkan akan dipergunakan untuk membangun jalan, fasilitas umum, sekolah, dll.

MP : yang terakhir pak, apa saja faktor yang mendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017?

NS : kualitas pelayanan kita yang semakin meningkat mas. Karena setiap tahun kita melakukan evaluasi dari sdm maupun pelayanan. Dan juga dari persepsi masyarakat akan manfaat pajak sehingga masyarakat jadi lebih aktif dalam membayar PBB-P2nya sendiri

MP : faktor yang menjadi hambatannya gimana pak?

NS : belum validnya basis data subjek dan objek pajak PBB sehingga menimbulkan peningkatan potensi piutang

MP : upaya dalam menanggulangi hal tersebut pak?

NS : kita melakukan kegiatan pemutakhiran data secara berkala dan kebijakan penghapusan piutang serta program penghapusan denda PBB-P2

MP : Dari pendapat bapak pribadi terkait pemungutan PBB-P2 ini bagaimana ya pak? Apakah pemungutan PBB-P2 ini sudah baik pelaksanaannya?

NS : Tentunya kita harus melaksanakan pemungutan PBB-P2. Sampai sekarang mungkin kita masih ada kekurangan dalam melaksanakan perda ini. Oleh karena itu akan terus kita sempurnakan khususnya koneksitas antara transaksional BPHTB terkoneksi dengan data base PBB P2. Secara umum perda ini sudah berjalan dengan baik namun masih banyak yang harus dibenahi

**Hasil Wawancara dengan Bagian seksi Pelayanan, Pendataan, dan
Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya BPPRD Kabupaten
Kubu Raya**

Peneliti (MP) : Muhammad Bramantyo

**Narasumber (NS) : Bapak Sagi kepala seksi Pelayanan, Pendataan,
dan Penetapan Pajak, Retribusi dan Pendapatan
Lainnya BPPRD Kabupaten Kubu Raya**

Tanggal : 17 Januari 2018

MP : bagaimana awal proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya saat mulai berlakunya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah?

NS : awalnya kita mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di daerah. Dan itu juga diikuti dengan keluarnya Perda dari Pemda yaitu Perda No.1 tahun 2011. Setelah keluarnya perda tersebut barulah kita melakukan proses pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupate Kubu Raya ini

MP : Bagaimana persiapan dari segi SDM, sarana dan prasarana demi terlaksananya pengalihan PBB-P2 ini?

NS : sebenarnya kita sudah melakukan persiapan akan pengalihan PBB-P2 ini yang dari pusat ke daerah, namun ada beberapa aspek yang masih kurang

dan perlu dilakukannya evaluasi. Seperti dari SDM ahli dan SDM secara kuantitas yang kurang, kemudian sarana kantor dan sarana transportasi untuk menembus geografis Kubu Raya yang aksesnya masih sulit.

MP : bagaimana tanggapan dari masyarakat terkait pengalihan PBB-P2 ini yang dari pusat menjadi ke daerah?

NS : masyarakat sangat mendukung dengan adanya hal ini. Dikarenakan dengan bertambahnya pemasukan bagi daerahnya maka tidak menutup kemungkinan pembangunan daerahnya akan terus meningkat

MP : Apa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 pak?

NS : Nah itu sdmnya kebetulan disini juga masih kurang dari segi kuantitas. Kalo dari segi kualitas tentang pemahaman pajak teman teman yang ada disini sudah paham karena pernah dilatih di kpp pratama selama 3 bulan. Karena sebelum serah terima pada tahun 2012 kmren teman teman yang ada disini di magangkan disana selama 3 bulan. Dan akhirnya yang mengurus pbb juga teman teman yang sudah pernah di latih di kpp pratama.

MP : upaya yang dilakukan dari pihak BPPRD dalam menanggulangi hambatan tersebut?

NS : dengan melakukan perekrutan lebih ke pegawai honorer. Sehingga kekurangan SDM disini dapat diperkecil

MP : kalau faktor pendukungnya pak dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013?

NS : dilihat dari target dan potensi PBB-P2 yang ditetapkan tidak terlalu besar, sehingga membuat mental pegawai yang ada disini tidak menjadi tertekan akan target yang ada dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2

MP : faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 kemarin pak?

NS : sebagian besar dari data. Awalnya kita menerima data dari kpp pratama diserahkan apa adanya. Tidak tahu permasalahan tiap data itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu rupanya ada beberapa piutang pajak yang belum diketahui. Contohnya seperti wp yang tidak aktif itu terinput terus setiap tahun. Sehingga mengakibatkan piutang pajak yang terus muncul karena tidak tertagih tadi. Tidak tertagih karena apa? Wajib pajak sudah tidak valid lagi. Arti dari tidak valid contohnya subjek pajak yang sudah tidak ada/mati, objek pajak yang tidak diketahui alamatnya, objek pajak yang sudah beralih nama tapi masih terinput dengan nama yang lama.

MP : upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut pak?

NS : kita melakukan pemutakhiran data demi memvalidasi data – data yang masih terkesan rancu

MP :Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 pak?

NS : sarana prasarana yang sudah mulai memadai meskipun masih belum cukup. Mulai dari sarana transportasi, komunikasi, hingga pemetaan

MP : kalau hambatan apa saja yang mempengaruhi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015 pak?

NS : untuk hambatan mungkin dari sisi kepatuhan wajib pajaknya yang masih agak kurang ya. Dikarenakan mungkin dari mereka masih belum mengerti apa arti penting dari pajak itu sendiri

MP : bagaimana upaya dari pihak BPPRD dalam menanggulangnya?

NS : dengan kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya PBB-P2 dalam pembangunan daerah

MP : kalo untuk faktor pendukungnya itu bagaimana pak?

NS : dari pihak BPPRDnya sendiri yang sudah semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Kenapa bisa begitu, dikarenakan BPPRD banyak belajar dari evaluasi dari tahun – tahun sebelumnya.

MP : kalau tidak salah untuk pada tahun 2016 kendalanya masih seputar tentang banyaknya data yang belum valid dan juga kepatuhan masyarakat yang masih kurang ya pak? Begitu juga dengan tahun 2017 pak?

NS : iya mas. Kurang lebih hambatan untuk setiap tahun itu sama

MP : jadi untuk tahun 2016 dan tahun 2017 upaya apa yang dilakukan BPPRD pak dalam menghadapi kendala tersebut?

NS :memaksimalkan perangkat kecamatan dan desa serta melibatkan para RT untuk melakukan validasi data dan juga memaksimalkan sanksi agar menimbulkan efek jera di masyarakat

MP : untuk faktor pendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 pada tahun 2016 dan 2017 apa saja ya pak?

NS : makin mudahnya akses dalam menjangkau wp yang berada di daerah pelosok/pesisir di Kabupaten Kubu Raya dikarenakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kubu Raya tiap tahun semakin meningkat

Hasil Wawancara dengan pihak PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya

Mahasiswa Peneliti (MP) : Muhammad Bramantyo

Narasumber (NS) : Bapak Ibrahim selaku Kepala bagian PBB dan BPHTB Kabupaten Kubu Raya

Tanggal : 16 Januari 2018

MP : Bagaimana awal proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya saat mulai berlakunya pengalihan PBB-P2 dari pusat daerah pak?

NS : pada awalnya itu kita mengikuti arahan dari pak bupati melalui perda pada tahun 2011 yang berkaitan dengan UU 28 tahun 2009. Menurut saya, kenapa mulai dipindahkannya pbb-p2 dari pusat ke daerah karena kalau penarikannya ke pusat jadi kurang maksimal makanya pindah ke daerah. Pada awal proses pemungutan ini potensinya menjadi naik, dikarenakan banyak data yang masuk.

MP : Bagaimana persiapan dari segi SDM, sarana dan pra sarana demi terlaksananya pengalihan PBB-P2 ini pak?

NS : untuk dari segi SDM, kita dari pihak kantor BPPRD sangat kekurangan SDM dari segi penilai pajak, dikarenakan rata rata pegawai di kantor ini basic ilmunya memang bukan dari terapan ilmu perpajakan. Kalau dari sarana dan pra sarana cukup tapi

menuhi standar, karena sekarang kantornya baru saja selesai dibangun dan ditempati, jadi masih banyak ruangan2 yang kurang. Seperti ruang konsultasi misalnya.

MP : Bagaimana reaksi masyarakat terkait pengalihan PBB-P2 ini yang dari pusat jadi ke daerah

NS : masyarakat sudah sebagian besar tahu, karena kita juga sudah melakukan penyampaian. Sosialisasi ke desa2 dan juga sudah di sampaikan di blanko SPT. Dan masyarakat tanggapannya positif dikarenakan jika pbb-p2 ini menjadi pajak daerah maka pendapatan daerah mereka juga akan bertambah.

MP : Apa saja faktor yang mendukung dalam proses pemungutan PBB-P2 di kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013?

NS : pada tahun 2013 mungkin faktor yang menjadi pendukung pemungutan PBB-P2 adalah dari pihak fiskus BPPRD yang sudah siap untuk melakukan pemungutan, dikarenakan sebelum mulai diberlakukannya pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah dan mulai diberlakukannya pemungutan pihak fiskus sudah diberikan pembekalan dari pihak KPP Mempawah.

MP : Apa saja kendala yang dihadapi pihak BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013?

- NS : nah ini data yang masih banyak yang harus dipindahkan. Data wajib pajak PBB-P2 di Kubu Raya ini lumayan banyak yang harus dipindahkan. Belum lagi data lama yang harus diperbarui setiap tahunnya. Dengan SDM yang terbatas maka proses pemindahan data PBB pun menjadi sedikit terhambat.
- MP : Upaya apa saja yang telah dilakukan pihak kantor BPPRD Kabupaten Kubu Raya dalam menghadapi kendala dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2013?
- NS : kita terus melakukan pemutakhiran data demi melengkapi data – data yang kurang terkait dengan pengalihan pbb-p2 yang dari pusat menjadi pemasukan di daerah.
- MP : kalau di tahun 2014 pak, faktor pendukung dari proses pemungutan PBB-P2 nya itu gimana ya pak?
- NS : setahun setelah dilakukannya pengalihan pemungutan pbb-p2 ini dari pusat ke daerah dan dilihat dari realisasi penerimaan pbb-p2 kita ini yang sudah menembus target, mungkin faktor pendukungnya dari wajib pajaknya itu sendiri yang sudah semakin sadar akan pentingnya pbb bagi daerah mereka.
- MP : Untuk kendalanya pak, di tahun 2014 ini kendala dari pemungutan Pbb-p2 itu seperti apa ya?

- NS : kendalanya masih sama seperti tahun lalu, yaitu masalah data. Disamping data tahun lalu yang masih belum selesai di rekap, ada tambahan data yang masih harus dibenahi di tahun 2014, misalnya seperti alamat wajib pajak yang baru, penggantian nama terkait kepemilikan property yang baru, nah ini kan bisa menghambat proses penagihan pbb-p2 yang sedang kita laksanakan.
- MP : Upaya yang dilakukan pak demi terlaksananya proses pemungutan PBB-P2 yang baik pada tahun 2014?
- NS : kita tetap kejar subjek dari pbb-p2 itu sendiri. Meskipun dengan sdm yang sangat terbatas, kita tetap berusaha sebaik mungkin demi mengejar data yang tertinggal itu.
- MP : Terkait di tahun 2015 yang hasil pemungutan pbb-p2 yang sangat jauh dari target, menurut bapak itu apa yang menjadi faktor utama dalam menyebabkan hal tersebut?
- NS : tahun 2015 ini ya memang banyak evaluasinya ketika di akhir tahun masa pbb-p2. Menurut saya, ini mungkin target yang ditentukan dari pemda terlalu tinggi yaitu hampir 4 kali lipatnya target pada tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi di lapangan saja kita masih sulit. Sulit disini dilihat dari masih kurangnya sdm yang mumpuni, kondisi geografis kubu raya yang masih ada beberapa yang aksesnya sulit, dan juga kesadaran masyarakat terutama di daerah pesisir yang masih belum paham akan pbb-p2 ini.

- MP : Untuk faktor pendukungnya pak pada tahun 2015?
- NS : dari pihak pegawai kantor BPPRD nya yang terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi target dari pemungutan pbb-p2 ini meskipun pada akhirnya di akhir tahun realisasi penerimaan pbb-p2 malah turun dibandingkan tahun lalu.
- MP : Upaya yang dilakukan pihak BPPRD dalam menghadapi kendala dalam proses pemungutan pbb-p2 di kabupaten kubu raya pada tahun 2015 ini pak?
- NS : kita terus lakukan evaluasi berdasarkan pengalaman di tahun 2013 dan 2014. Entah itu evaluasi dari wajib pajaknya, sistem dalam pelayanan pbbnya bahkan evaluasi dari sdm kita sendiri. Agar di tahun berikutnya proses pelaksanaan pemungutan pbb-p2 di Kabupaten Kubu Raya bisa berjalan dengan lebih baik lagi
- MP : Lanjut di tahun 2016 pak, apa yang menjadi faktor pendukung dari proses pemungutan pbb-p2 ini pak?
- NS : dikarenakan kita sudah banyak melakukan evaluasi di 3 tahun sebelumnya. Jadi kita mempunyai banyak hal yang bisa dicegah yang dimana dapat menjadi hambatan di pemungutan pbb-p2 kabupaten kubu raya pada tahun 2016. Contohnya sdm yang semakin baik, tata cara pelayanan pbb-p2 ke masyarakat juga semakin baik,

- MP : Apa saja kendala yang dihadapi pihak BPPRD dalam menjalani pemungutan PBB-P2 ini pada tahun 2016 pak?
- NS : kendalanya masih klasik ya. Yaitu kendala data yang mereka (wp pbb-p2) sampaikan itu akurat atau tidak. Karena tidak semua masyarakat mau transparansi untuk menyampaikan data pajak mereka.
- MP : Upaya yang dilakukan pihak BPPRD untuk mengatasi kendala pemungutan PBB-P2 ini pada tahun 2016 pak?
- NS : kita lakukan pemutakhiran data, kita melakukan validasi piutang, kita pisahkan data – data dan kita kembalikan data – data yang lama. Sistem komputerisasi juga kita perbaiki.
- MP : Yang terakhir pak, pada tahun 2017, faktor apa yang mendukung pihak BPPRD dalam melakukan proses pemungutan PBB-P2 ini pak?
- NS : kurang lebih sama seperti pada tahun 2016 ya, kita banyak ambil pelajaran dari evaluasi dari tahun – tahun sebelumnya. Kita perbaiki sdm, pelayanan, komputerisasi terkait menghimpun data pbb dan dari pihak wajib pajaknya sendiri yang semakin modern, semakin mengerti akan pentingnya membayar pajak untuk kemajuan daerah mereka sendiri

- MP : Kendala yang dihadapi dalam melakukan proses pemungutan pada tahun 2017 pak?
- NS : kita masih terkendala akan rendahnya kinerja penatausahaan piutang pbb-p2 ini. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak.
- MP : Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada tahun 2017 pak terkait pemungutan pbb-p2 ini?
- NS : dengan meningkatkan kinerja pelayanan dari pbb-p2. Dan juga kita terus melakukan pemutakhiran data untuk menutupi kendala yang saya sebutkan tadi.
- MP : Menurut bapak sejauh ini apakah proses pemungutan pbb-p2 di kabupaten kubu raya ini sudah berjalan dengan baik?
- NS : sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih banyak yang harus dibenahi. Seperti data, sarana dan prasarana yang diperbaiki dan juga sdm yang diperbanyak.
- MP : Mungkin cukup pak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih pak atas bantuannya
- NS : iya sama – sama mas. Semoga sukses.

Hasil Wawancara dengan pihak Wajib Pajak di Kabupaten Kubu Raya**Mahasiswa Peneliti (MP) : Muhammad Bramantyo****Narasumber (NS) : Bapak Mario Suryo, Wajib Pajak PBB
Kabupaten Kubu Raya****Tanggal : 17 Januari 2018**

MP : Apakah anda tau terkait dengan Pengalihan PBB-P2 ini. Dan apakah pernah di sosialisasikan ke masyarakat

NS : Terkait dengan pernah di sosialisasikan atau tidak. Saya rasa pernah disosialisasikan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat atau ketika melakukan pembayaran pbb di tempat yang lama. Namun itu hanya di beberapa tempat saja, sedangkan masyarakat yang berdomisili di agak pedalaman masih banyak yang belum terkena sosialisasi dari Pemda

MP : Apakah ada dampak terhadap wajib pajak terkait a
galihan PBB-P2 ini? Mulai dari tarif, tempat pembayaran dan lainnya?

NS : ada perubahan dari sebelumnya dilakukan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah sampai dilakukannya PBB-P2 di daerah. Yaitu dari tarif pbb yang naik turun. Dan setelah dilakukannya pemungutan PBB-P2 ke daerah ini cara pembayarannya menjadi lebih mudah dari segi akses dimana jadi lebih dekat dibandingkan sebelum dilakukannya perda ini.

MP : Ketika dilakukannya pengalihan PBB-P2 ini. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan dengan baik?

NS : Teman teman saya yang tempat tinggalnya masih terbilang cukup pedalaman kadang masih banyak yang belum bayar PBB di Kabupaten Kubu Raya dikarenakan tempat pembayaran yang sangat jauh. Dan sampai sekarang blm ada sanksi yang tegas dari pihak pemerintah yg dulu kecuali dari tarif denda yang diberikan. Seharusnya pemerintah memberlakukan sistem jemput bola kepada wp untuk mengurangi jumlah wp yg blm bayar pbb. Atau bisa saja dengan. Atau juga bisa dengan memberikan kewenangan kepada perangkat desa untuk memungut pbb di tiap wilayahnya masing2

MP : Pendapat saudara terkait pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kubu Raya? Apakah sudah berjalan dengan baik ?

NS : Sejauh ini sudah berjalan dengan bagus. Pembayaran pbb jadi lebih mudah. Pelayanan jadi lebih bagus dibanding sebelumnya. Mungkin permasalahanya kembali lagi ke wp sendiri. Apakah mau menjadi wp yang taat terhadap hukum atau tidak hahaha.

Lampiran 2 Surat Riset



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 8765/UN10.3/PG/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya

Jl. Arteri Supadio, Sungai Raya, Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya
 Kalimantan Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Muhammad Bramantyo
 Alamat : Jl. Danau Sentarum, Komplek Ari Karya Indah 3, B.36, Kota Pontianak
 NIM : 135030400111055
 Jurusan : Administrasi Bisnis
 Prodi : Perpajakan
 Tema : Analisis Implementasi Perda Kabupaten Kubu Raya No.12 tahun 2012
 Lamanya : 4 (empat) minggu.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Juni 2017



Sebagai Program Studi Perpajakan

[Signature]
Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si

NIP. 19600515 198601 1 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Lampiran 3 Surat Persetujuan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Supadio, Telp (0561) 722744 - 722774, Fax (0561) 723443
 SUNGAI RAYA Kode Pos : 78391

Sungai Raya, 19 Juni 2017

Kepada

<p>Nomor : 420 /341/ BPPRD-A Lampiran : 1 (satu) Lembar Perihal : Pemberian Izin Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa</p>	<p>Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya di- Tempat</p>
--	--

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor: 8765/UN10.3/P6/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Hal Permohonan Data Untuk Penyelesaian Tugas Akhir atas nama Muhammad Bramanta NIM 135030400111055 Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi, pada prinsipnya kami memberi izin dapat kami terima dengan ketentuan mengikuti peraturan yang berlaku pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya .

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala BPPRD
 Kabupaten Kubu Raya

Drs. H. Gusmawan, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19630810 198903 1 021



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Bramantyo
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. NIM : 135030400111055
4. Program Studi : Perpajakan
5. Tempat, Tanggal Lahir : Putussibau, 23 – Juni - 1995
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Danau Sentarum, Komplek Ari Karya Indah 3,
B.36 RT 004/ RW 036, Kota Pontianak
8. No. Handphone : 085646425388
9. Email : muhammadbramantyo@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Raudathul Atfal 2000 - 2001
2. SD : SD Muhammadiyah 1 2001- 2007
3. SMP : SMP Negeri 1 Pontianak 2007 - 2010
4. SMA : SMA Negeri 1 Pontianak 2010 - 2013

C. Nama Orang Tua

1. Ayah : Odang Prasetyo
2. Ibu : Marlina

D. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

Malang, 8 – Februari – 2018

Muhammad Bramantyo